

**ISLAM DAN DEMOKRASI****Telaah Atas Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum Langsung Oleh Rakyat  
Dalam Perspektif Sosiologis**

Ieke Sartika Iriany

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Garut

Telp/Fax/HP: 08122358561; e-mail: ieke\_sartika@yahoo.com

**Abstrak.** Indonesia tengah dilanda berbagai masalah yang kompleks. Sistem demokrasi yang seyogyanya menghasilkan masyarakat yang bebas dan sejahtera, tidak terlihat hasilnya, malah kenyataannya bertolak belakang, karena demokrasi membutuhkan sosok yang mampu mengarahkan ke arah visi yang benar mengenai demokrasi, memiliki cara komunikasi politik yang penuh empati, serta mempunyai kecerdasan akademik dan emosional untuk membawa Indonesia ke dalam sistem politik demokratis yang disertai aktivitas keislaman. Fenomena semaraknya aktivitas keislaman justru diiringi dengan fenomena semaraknya kriminalitas, korupsi, dan rendahnya *social trust* di kalangan masyarakat. Agama Islam yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia, belumlah ekuivalen dengan lahirnya masyarakat yang beradab (*civility*), lahirnya masyarakat *hard state*, dan masih terlalu jauh dalam khayalan *baldatun thayyibatun wa robbun ghafur*. Perilaku keagamaan (khususnya Islam) di Indonesia dapat memberikan nilai-nilai kontributif dalam konstruksi budaya *soft state*. Salah satu fenomena ini dapat ditelaah dalam pelaksanaan pemilu, bahwa implementasi perilaku demokrasi, secara visioner idealnya konsisten dengan komunikasi politik dan nilai-nilai agama Islam.

**Kata Kunci :** Islam, komunikasi politik dan demokrasi

**Abstract.** *Indonesia has been hit by complex problems. A democratic system that should produce a free and prosperous society, no results, in fact contradictory, because democracy requires a figure that can lead to a true vision of democracy, has a way of empathetic political communication, and has the academic and emotional intelligence to Bringing Indonesia into a democratic political system accompanied by Islamic activities. The phenomenon of splendor of Islamic activity is precisely accompanied by phenomena of splendor of criminality, corruption, and low social trust among the community. The Islamic religion of the majority of Indonesians, not yet equivalent to the birth of civilized society (civility), the birth of the hard state community, and still too far in the fantasy of baldatun thayyibatun wa robbun ghafur. Religious behavior (especially Islam) in Indonesia can provide contribute values In the construction of soft state culture. One of these phenomena can be examined in the election exercise, that the implementation of democratic behavior, is ideally ideally consistent with political communication and Islamic religious values.*

**Keywords:** *Islam, Political, Communication and democracy*

## I. Pendahuluan

Demokrasi dapat didefinisikan sebagai “pemerintahan oleh rakyat; khususnya, oleh mayoritas; pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dandilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik; rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau *privelese* berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan (Merriam, *Webster Dictionary*)

Demokrasi adalah suatu pemikiran manusia yang mempunyai kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat. Negara Indonesia menunjukkan sebuah Negara yang sukses menuju demokrasi sebagai bukti yang nyata, dalam pemilihan langsung presiden dan wakil presiden. Selain itu bebas menyelenggarakan kebebasan pers. Semua warga negara bebas berbicara, mengeluarkan pendapat, mengkritik bahkan mengawasi jalannya pemerintahan. Demokrasi memberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat bahkan dalam memilih salah satu keyakinan pun dibebaskan.

Indonesia sebagai negara republik yang multipartai dengan penduduk kurang lebih 257,9 juta. Di tahun 2013Djoko Widodo menjadi presiden terpilih ketiga negara Indonesia melalui pemilu yang dinilai oleh pengamat internasional sebagai bebas dan adil. Pemilih juga memilih dua lembaga legislatif nasional di tahun 2014: dan tahun 2009 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan lembaga yang baru dibentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Saat ini Pemilu diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Undang-Undang (UU) Nomor 08/2012 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislatif) serta Undang-Undang Nomor 2/2011. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dan dalam hitungan tiga tahun ke depan, Indonesia kembali akan melaksanakan pesta demokrasi melalui Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam dunia politik, seperti halnya implementasi demokrasi dalam pemilu, dibutuhkan komunikasi yang efektif dalam berpolitik. Karena kegiatan politik harus dilandasi oleh kegiatan komunikasi untuk menyalurkan ide, gagasan, dan perjuangan dalam bidang-bidang penting dalam negara. Apabila seorang politisi tidak membicarakan tentang ide, gagasan, dan perjuangan bidang-bidang penting dalam negara, melainkan membicarakan tentang gaya hidupnya seperti yang dilakukan oleh beberapa politisi dari kalangan selebriti, artinya ia sedang tidak berperan sebagai politisi.

Fungsi komunikasi politik pada hakekatnya sebagai jembatan penghubung antara suprastruktur dan infrastruktur yang bersifat interdependensi dalam ruang lingkup negara. Komunikasi ini bersifat timbal balik atau dalam pengertian lain saling merespons sehingga mencapai

saling pengertian dan diorientasikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Berbicara tentang komunikasi politik (*political communication*) perhatian kita langsung pada konsep komunikasi dan konsep politik. Sehingga pengertian utama adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah (*"publicpolicy"*). Miriam Budiardjo (1996) menyatakan "Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi partai politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa penggabungan kepentingan (*interestaggregation*) dan perumusan kepentingan (*interestarticulation*) untuk diperjuangkan menjadi *publicpolicy*".

Melakukan implementasi komunikasi politik dalam membangun suatu system demokrasi disuatu Negara bukanlah hal yang mudah karena tidak menutup kemungkinan pembangunan system demokrasi di suatu Negara akan mengalami kegagalan. Tetapi yang harus kita banggakan demokrasi dinegara Indonesia sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat contohnya dari segi kebebasan, berkeyakinan, berpendapat atau pun berkumpul mereka bebas bergaul tanpa ada batasan-batasan yang membatasi mereka. Tapi bukan berarti demokrasi di Indonesia saat ini sudah berjalan sempurna masih banyak kritik-kritik yang muncul terhadap pemerintah yang belum sepenuhnya bisa menjamin kebebasan warga negaranya. Dalam hal berkeyakinan juga pemerintah belum sepenuhnya. Berdasarkan survei tingkat kepercayaan

masyarakat terhadap demokrasi semakin besar bahkan demokrasi adalah system yang terbaik meskipun system demokrasi itu tidak sempurna.

Keberhasilan Indonesia dalam menetapkan demokrasi tentu harus dibanggakan karena banyak Negara yang sama dengan Negara Indonesia tetapi Negara tersebut tidak bisa menegakan system demokrasi dengan baik dalam artian gagal. Akibat demokrasi jika dilihat diberbagai persoalan dilapangan adalah meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya kemacetan dijalan, semakin parahnya banjir masalah korupsi, penyelewengan dan itu adalah contoh fenomena dalam suatu Negara system demokrasi.

Dalam kehidupan berpolitik di setiap Negara yang kerap selalu menikmati kebebasan berpolitik namun tidak semua kebebasan berpolitik berjalan sesuai dengan yang diinginkan, karena pada hakikatnya semua system politik mempunyai kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Demokrasi adalah sebuah proses yang terus-menerus merupakan gagasan dinamis yang terkait erat dengan perubahan. Jika suatu Negara mampu menerapkan kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan dengan sempurna. Maka Negara tersebut adalah Negara yang sukses menjalankan system demokrasi sebaliknya jika suatu Negara itu gagal menggunakan system pemerintahan demokrasi maka Negara itu tidak layak disebut sebagai Negara demokrasi.

Dengan demikian, sebagai warga Negara Indonesia yang meganut system pemerintahan yang demokrasi kita sudah sepatutnya untuk terus menjaga dan memperbaiki, melengkapi kualitas-

kualitas demokrasi yang sudah ada. Demi terbentuknya suatu system demokrasi yang utuh di dalam wadah pemeritahan bangsa Indonesia. Demi tercapainya suatu kesejahteraan, tujuan dari cita-cita demokrasi yang sesungguhnya akan mengangkat Indonesia ke dalam suatu perubahan.

Dalam Komunikasi politik, merupakan suatu keharusan untuk pemanfaatan media guna mendongkrak popularitas, sebenarnya telah mulai marak dan bebas sejak Pemilu 1999 dan semakin menguat di Pemilu 2004 hingga Pemilu 2009. Dan Pemilu 2014. Segala kegiatan yang ada nuansa politik diangkat media bertujuan tak hanya sebagai sarana publisitas namun juga mempengaruhi khalayak untuk memilihnya. Dengan hadirnya media massa sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan terutama mengenai politik akan mempermudah kepada setiap komunikator politik dalam menyampaikan dan memperkenalkan siapa dirinya kepada khalayak.

Begitu berkuasanya media dalam mempengaruhi pikiran, peranan, dan perilaku penduduk, sehingga Kevin Philips dalam buku *responsibility in mass Communication* mengatakan, bahwa era sekarang lebih merupakan *mediacracy*, yakni peemerintahan media, daripada demokrasi pemerintahan rakyat.

Selain hal tersebut manusia merupakan sarana bagi saluran komunikasi yang paling utama. Meskipun terdapat berbagai macam perbedaan pola komunikasi politik yang berlaku dalam sistem politik, namun saluran komunikasi politiknya pada umumnya adalah sama. Lebih tepatnya, saluran komunikasi politik

dapat diambil pengertian bersama tentang siapa berbicara kepada siapa, mengenai apa, dalam keadaan bagaimana dan sejauh mana dapat dipercaya.

Saluran komunikasi politik memiliki banyak saluran dan yang paling sering digunakan adalah melalui saluran media massa. Namun, tidak hanya media massa yang menjadi saluran informasi politik. Komunikasi politik pun dapat terjadi melalui kelompok-kelompok kepentingan maupun partai-partai politik.

Demokratisasi di negeri ini sejak reformasi bergulir merupakan indikasi terjadinya dinamika sejarah baru yang cukup menggembirakan dalam proses kebangsaan dan kenegaraan. Ditandai dengan keberhasilan melaksanakan pemilu legislatif, pemilihan presiden langsung dan selanjutnya pemilihan kepala daerah secara langsung hampir tanpa konflik mengkhawatirkan. Indikator keberhasilan secara kuantitatif bisa diketahui dari jumlah partisipasi pemilih, parpol, jumlah calon kepala daerah sampai tingkat keamanan serta konsolidasi di dalamnya, sudah waktunya kita refleksikan dengan tingkat signifikansi perubahan dan perbaikan kondisi masyarakat.

Keberhasilan proses (transisi) demokrasi saat ini telah menjadikan dunia internasional menempatkan Indonesia sebagai *new state of democracy* di Asia yang sebelumnya di kenal sebagai lahan subur diktator dan otoritarianisme.

Demokrasi sebagai *universal value* tentu tidak menjadi hak kepemilikan individu maupun klaim kelompok di tengah masyarakat, tetapi merupakan "entitas" yang memiliki nilai lintas sektoral serta diperjuangkan demi kepentingan bersama. Kehidupan

masyarakat kita yang amat plural dan sarat dengan keragaman sosial budaya, maka tidak ada lem perekat yang lebih cocok kecuali demokrasi. Termasuk di dalamnya sistem politik dan tatanan kenegaraan sebagai representasi kehendak publik yang demikian pluralistik.

Haryatmoko (2003; xii) bahwa sistem politik yang mampu menopang pluralitas dan menyelesaikan konflik dengan cara damai adalah demokrasi. Dengan demikian keberadaan demokrasi dengan nilai-nilai di dalamnya harus dijadikan wacana dan *common interest* dari partai politik maupun asosiasi sosial seperti: LSM, ormas keagamaan, ormas pemuda, mahasiswa, kelompok paralegal, dan sekaligus dijadikan budaya masyarakat pada umumnya.

Pertanda lain bahwa demokrasi sedang berjalan adalah terdapatnya distribusi kekuasaan serta penyebaran kekuatan di tengah masyarakat sehingga terjadi keseimbangan serta upaya saling kontrol secara linier. Sebenarnya dalam praktik, demokrasi adalah konsensus dari banyak kelompok dan kepentingan melalui mekanisme tertentu yang disepakati bersama. Untuk itu segala substansi demokrasi akan memiliki relasi signifikan dengan terminologi komunikasi politik di dalamnya. Artinya komunikasi (politik) merupakan instrumen strategis untuk mengantarkan terbentuknya ruang publik bagi transaksi keinginan dan cita-cita pelaku politik sebagai prasyarat demokrasi.

Terkait dengan nilai demokrasi dan pluralitas sosial maka terdapat pemikiran dari Georg Sorensen (2003; 105) bahwa "masyarakat yang majemuk (plural) merupakan prakondisi penting bagi

demokrasi yang sedang berkembang karena asosiasi di tengah masyarakat menciptakan pusat kekuasaan di luar kekuatan negara".

Dimensi penting yang perlu diperhatikan dalam demokrasi politik adalah terdapatnya kompetisi, partisipasi serta kebebasan politik dan sipil. Kesemuanya terasa sudah dipenuhi pada saat pelaksanaan pemilu maupun pilkada lalu. Karena ruh demokrasi yang sebenarnya adalah "kebebasan" yang sesungguhnya membutuhkan partisipasi dalam bentuk demokrasi langsung (Sorensen; 8). Dengan demikian demokrasi jangan dijadikan topeng kepentingan pada saat melakukan komunikasi dengan konstituen maupun komunikasi saat di parlemen seperti yang sering terjadi saat ini.

Sejak memiliki kembali kebebasan sebagai hasil nyata reformasi, masyarakat dalam hak untuk menentukan nasib dan masa depan pemerintahan (pusat maupun lokal), nampaknya perlu refleksi kritis untuk menyorot tajam "panggung kekuasaan" hasil konstruksi via pemilu guna dikonfirmasi dengan harapan dan cita-cita bersama sebagai satu bangsa.

Pendapat Sorensen (2003; 8) bahwa "kebebasan adalah kebebasan individu dalam masyarakat sipil. Demokrasi dapat menjadi sebuah alat untuk mencapai tujuan ini, tetapi bukan menjadi tujuan itu sendiri. Inti demokrasi adalah prinsip masyarakat yang setara dalam bidang politik". Demokrasi ketika dipahami dalam wacana partai politik dan pemilu maka hasil akhirnya adalah instrumen untuk menggapai "kekuasaan".

Sementara kekuasaan, politik uang dan korupsi amat melekat dengan praktik-

praktik kekuasaan yang tentu amat berseberangan dengan nilai demokrasi. Walhasil, etika politik dan moralitas publik pantas dan urgen untuk diaktualisasikan kembali mengiringi dinamika perpolitikan saat ini. Apakah arti nilai demokrasi kalau pada saatnya hanya menghasilkan elite kepemimpinan yang menganggangi nilai-nilai tersebut demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Partai politik sebagai tumpuan utama masyarakat dalam berdemokrasi diharapkan mampu merealisasikan kepentingan serta mengkanalisasi aspirasi masyarakat ke ranah kebijakan publik. Bukan sebaliknya parpol beramai-ramai mengagendakan mobilisasi politik "sesaat" pada waktu pemilu untuk mengantarkannya ke panggung kekuasaan dan setelah itu terdapat kesenjangan lebar antara harapan dengan perilaku anggota DPR/DPRD.

Terkait dengan hal ini sebagaimana saran Sorensen (2003;105) bahwa jalan terbaik untuk memulai demokrasi adalah dengan berperan aktif di partai politik. Adapun perlunya kita mengingatkan tentang urgensi etika politik tidak lain agar pengelola parpol senantiasa mengedepankan nilai demokrasi sebagai sarana menciptakan kesejahteraan masyarakat dan bukan justru mereka terjebak dalam tradisi Machiavelis yang menghalalkan segala cara dalam berpolitik.

Demokrasi yang melegitimasi terdapatnya keragaman (pluralitas) tentu harus dipraktikkan ke ranah politik dan ke-kuasaan. Untuk itu dibutuhkan alat untuk mengantarkan terjadinya proses tawar dan konsensus diantara komponen sosial politik yang ada. Instrumen tersebut

adalah komunikasi politik, yang menurut Dan Nimmo (1993; vi) adalah "aktivitas komunikasi yang bermuatan politik untuk tujuan kebajikan dengan berbagai konsekuensi yang mengatur tingkah laku manusia dalam keadaan konflik".

Dengan komunikasi berbagai nilai demokrasi tersebut dapat dikemas ke dalam pesan politik yang akan memiliki implikasi positif bagi upaya mewujudkan cita-cita bersama sebagai warga bangsa yang telah mempercayakan proses kenegaraan dan pemerintahan kepada parpol. Menjamurnya partai politik menjelang pemilu beberapa waktu lalu menunjukkan masyarakat amat sadar mekanisme demokrasi sebagai cara terbaik untuk mewujudkan cita-cita bersama. Namun yang terjadi adalah fenomena membiasnya fungsi dan peran parpol dalam komunikasi dan sosialisasi politik, dimana rakyat sering tidak mengetahui atau amat terlambat dalam mengikuti dinamika kebangsaan dan kebijakan pemerintah yang berimplikasi luas pada kehidupan rakyat.

Komunikasi menjadikan setiap individu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan kemasyarakatan di tingkat lokal dengan karakteristik terbuka dan rasional. Sebagaimana pendapat Jurgen Habermas (dalam Piliang, 2000;104) bahwa komunikasi adalah upaya untuk mencapai konsensus bersama dalam memecahkan berbagai persoalan dan tujuan bersama lewat cara argumentasi yang rasional. Dalam ranah demokrasi dan kehidupan politik tentu konsensus itu dicapai melalui komunikasi politik. Demikian pula isi pesan komunikasi (politik) yang sarat dengan nilai demokrasi serta visi misi elite

politik sering tidak diikuti dialektika dengan kalangan akar rumput agar terdapat kesepahaman serta hilangnya kesenjangan yang mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap mekanisme demokrasi.

Oleh karenanya etika politik diperlukan secara kontinyu dalam proses komunikasi politik di tengah transisi demokrasi saat ini sebagaimana pendapat Paul Ricour (1990) bahwa "etika politik mengarahkan ke hidup baik bersama dan untuk orang lain dalam kerangka memperluas lingkup kebebasan dan menciptakan institusi-institusi yang lebih adil". Barangkali bisa dipahami dengan komunikasi politik yang beretika maka nilai-nilai demokrasi tetap dikedepankan serta mereka akan menjaga komitmen untuk mengutamakan kepentingan publik.

Bukan sebaliknya, komunikasi politik di era keterbukaan dan kebebasan saat ini hanya dijadikan alat merealisasikan kepentingan individu maupun ke-lompok dengan terus mengatasnamakan demokrasi, namun sebenarnya telah melakukan distorsi komunikasi yang pada akhirnya hanya memperpanjang penderitaan dan kesulitan hidup rakyat kecil. Walhasil dalam suasana keterbukaan maka komunikasi harus berjalan seiring dengan hadirnya public sphere sehingga proses politik dan pemerintahan hasil pilihan langsung rakyat bisa diikuti serta dikontrol langsung. Hal ini guna melengkapi fungsi legislasi parpol yang sering jauh dari idealita masyarakat.

Terkait hal tersebut maka terdapat thesis Habermas (dalam Piliang, 2000; 104) bahwa "debat di dalam ruang publik harus dilakukan dalam sebuah kondisi

yang ideal; yakni komunikasi yang di dalamnya tidak ada satu pihak pun yang diperbolehkan melakukan cara pemaksaan, penekanan dan dominansi".

Pertanyaan akhir adalah sudahkah kondisi ideal di atas terwujud dalam proses komunikasi dan demokratisasi yang berlangsung saat ini? Bagaimanakah demokrasi Indonesia dari pandangan Islam ?

Mengacu pada uraian tersebut, dan konsisten dengan tema yang telah ditetapkan, maka Telaahan Komunikasi Politik dalam Pemilihan Langsung oleh Rakyat dari konsep Islam dan demokrasi, penulis akan memandangnya dari perspektif sosiologis.

## II. Fenomena Demokrasi di Indonesia

Memperbincangkan hubungan Islam dengan demokrasi pada dasarnya sangat *aksiomatis*. Sebab, Islam merupakan agama dan risalah yang mengandung asas-asas yang mengatur ibadah, akhlak dan muamalat manusia. Sedangkan, demokrasi hanyalah sebuah sistem pemerintahan dan mekanisme kerja antaranggota masyarakat serta simbol yang diyakini membawa banyak nilai-nilai positif. Polemik hubungan demokrasi dengan Islam ini berakar pada sebuah "*ketegangan teologis*" antara rasa keharusan memahami doktrin yang telah mapan oleh sejarah-sejarah dinasti muslim dengan tuntutan untuk memberikan pemahaman baru pada doktrin tersebut sebagai respons atas fenomena sosial yang telah berubah.

Hubungan antara Islam dan demokrasi merupakan hubungan yang kompleks. Sebab, dunia Islam tidak hidup dalam keseragaman ideologis sehingga

terdapat satu spektrum panjang terkait hubungan antara Islam dan demokrasi ini. Khalid Abu al-Fadl (2004), mengatakan bahwa meskipun Al-Qur`an tidak secara spesifik dan eksplisit menunjukkan preferensi terhadap satu bentuk pemerintahan tertentu, tetapi dengan gamblang memaparkan seperangkat nilai sosial dan politik penting dalam suatu pemerintahan untuk Muslimin. Di antaranya adalah tiga nilai penting, yaitu *pertama* keadilan melalui kerja sama sosial dan prinsip saling membantu, membangun suatu sistem pemerintahan konsultatif yang tidak otokratis, melembagakan kasih sayang dalam interaksi sosial.

*Kedua*, bahwa di dalam Al-Qur`an terdapat prinsip-prinsip hidup berkemasyarakatan diantaranya kejujuran dan tanggung jawab, keadilan, persaudaraan, pluralisme, persamaan, musyawarah, mendahulukan perdamaian, dan kontrol. Secara prinsipial hal ini sejalan dengan doktrin politik dari konsep demokrasi, yaitu kedaulatan di tangan rakyat, dan negara merupakan terjemahan dari kedaulatan rakyat, maka Islam merupakan sistem politik yang demokratis; *ketiga*, Islam adalah sistem nilai yang membenarkan serta mendukung demokrasi. kelompok ini berpendapat bahwa Islam merupakan sistem nilai yang membenarkan demokrasi dan substansi demokrasi sesungguhnya berasal dari ajaran Islam.

Secara umum demokrasi itu kompatibel dengan nilai-nilai universal Islam. Seperti persamaan, kebebasan, permusyawaratan dan keadilan karena itu, menurut hemat penulis, umat Islam saat ini tidak seharusnya berada dalam ruang

pertentangan hubungan Islam dengan demokrasi, akan tetapi, yang lebih penting (*urgent*) untuk dilakukan umat Islam dalam pelaksanaan demokrasi dengan mengacu kepada ajaran kemaslahatan, keadilan, ijtihad (kemerdekaan berpikir), toleransi, kebebasan, persamaan, kejujuran serta tanggung jawab dan sebagainya.

Sebagai negara dengan penduduk umat Muslim terbesar di dunia, tentu saja kekuatan politik Islam di Indonesia tidak bisa dinafikan. Negeri ini bahkan berpotensi menjadi poros kekuatan politik Islam dunia. Namun kondisi itu hanya bisa terjadi apabila terjadinya kesatuan dan persatuan umat Islam, misalnya dalam pesta demokrasi Pemilu yang akan datang.

Sejarah telah mengabarkan bahwa persatuan umat Islam bukanlah hal yang mudah. Ada terlalu banyak faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab sulitnya persatuan itu terwujud. Karena jika persatuan dan kesatuan itu terjadi maka akan ada konsekuensi logis bagi Indonesia dan bagi negeri-negeri lain yang keberadaannya tidak bisa diabaikan dengan kehadiran Indonesia sebagai salah satu bangsa di dunia.

Jika merujuk Salim Ali al-Bahnasawi, politik adalah suatu cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat regulasi yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal merugikan bagi kepentingan manusia maka politik Islam memiliki maknanya sendiri. Merujuk suatu defenisi yang ditawarkan, politik Islam adalah aktivitas politik umat Islam yang menjadikan Islam sebagai nilai dan basis solidaritas berkelompok.

Bila mengacu kepada defenisi ini, maka orang yang mendukung politik



Islam bukan hanya umat Islam. Ini sebagai konsekuensi logis dari keberadaan Islam sebagai *rahmatan lil'alamiin*. Makna rahmat itu adalah sebuah keadaan sejahtera dan beradab yang dirasakan suatu komunitas atas keberadaan Islam yang menjiwai regulasi hidup bersama dalam suatu tatanan masyarakat.

Dengan demikian substansi politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku (*political behavior*) serta budaya politik (*political culture*) yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. tentunya bukan tanpa tantangan. Tarik menarik diantara keduanya inilah yang memerlukan mekanisme utuh untuk mengatur dan meminimalisasi segala potensi negatif yang mungkin muncul. Di sinilah peran komunikasi politik Islam salah satunya menjadi strategis. Komunikasi politik yang merupakan proses penyampaian pesan politik kepada khalayak. Pesan yang membentuk persepsi dan sikap politik pada gilirannya akan menjadi amunisi tenaga bagi dukungan khalayak.

Demokrasi selalu menyertai perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Semula Indonesia menganut pemerintahan demokrasi parlementer atau demokrasi liberal (1950-1959), kemudian demokrasi terpimpin (1959-1966) di bawah Soekarno, ada juga demokrasi Pancasila yang dikontrol Soeharto (1967-1998). Pasca-Soeharto, Indonesia kembali memasuki era demokrasi pascatransi, entah liberal atau demokrasi model lain.

Berhentinya Soeharto tahun 1998 mengantarkan Indonesia ke era demokrasi pascatransi dengan sistem multipartai yang ekstrem. Perubahan UUD 1945

menjadi kunci pembuka. Komisi negara tumbuh. Pers menikmati kebebasan. Orang bebas berpendapat dan berorganisasi. Rakyat berhak memilih sendiri siapa pemimpinnya. Sekali merdeka, merdeka sekali! Begitu ungkapan sinis orang. Proses pencarian demokrasi terus berlanjut sampai akhirnya Mahkamah Konstitusi memberikan landasan konstitusional bolehnya calon perseorangan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.

Apakah itu potret demokrasi yang memang kita dambakan? Sejak awal kita tidak memiliki cetak biru mengenai demokrasi Indonesia." Ia juga menyebutkan pembangunan demokrasi di era 1998-an terlalu difokuskan pada politik Jakarta. Meskipun demikian, kehadiran demokrasi di Indonesia bukanlah tidak membawa manfaat. Partisipasi politik yang tinggi adalah buah dari hadirnya sistem demokrasi. Rakyat boleh mengorganisasikan diri untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan.

Partisipasi politik melahirkan lompatan yang besar. Pada sisi lain, rakyat meragu kembali kebebasan sipil dan politik mereka. Rakyat menikmati kebebasan berpendapat. Rakyat menikmati kebebasan berorganisasi. Pada kondisi era demokrasi sekarang, kompetisi politik untuk meraih jabatan publik relatif terbuka. Seorang *demagog* (pemimpin rakyat) bisa bersaing dengan seorang politisi atau bahkan negarawan untuk memperebutkan ruang-ruang publik. Demokrasi membuka ruang persaingan antarkelompok rakyat (*popular rivalries*) ataupun propaganda elite.

Proses seleksi pejabat publik menjadi transparan dan relatif akuntabel meskipun dalam kenyataannya perekrutan pejabat publik membutuhkan biaya yang mahal dan hasilnya pun masih bisa mengundang keraguan publik. Kendati demikian, sistem demokrasi telah melahirkan sejumlah hal positif. Praktik demokrasi Indonesia membutuhkan penyempurnaan. Kesepakatan atas ideologi negara hukum (*rule of law*) dan penegakan hukum tentu merupakan pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan. Penegakan hukum, khususnya soal pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme yang merupakan amanat reformasi, masih dipandang diskriminatif.

Meskipun ruang kompetisi terbuka, kelemahan justru menerpa akuntabilitas, baik vertikal maupun horizontal. Sistem pemilihan umum yang dibangun tidak menghasilkan sistem akuntabilitas yang jelas. Dalam akuntabilitas vertikal, tidak jelas relasi antara pejabat terpilih dan orang yang memilih. Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan batas teritorial yang jelas juga tak menciptakan sistem akuntabilitas yang jelas. Bagaimana mekanisme pelaporan anggota DPD Jakarta atau Jawa Barat, misalnya, terhadap rakyat yang memilihnya tetaplah menjadi sebuah pertanyaan. Rakyat berdaulat tiap lima tahun.

Akuntabilitas horizontal juga bermasalah. Saling kontrol antara lembaga-lembaga negara, termasuk dengan komisi-komisi negara, juga menimbulkan masalah yang tak kalah rumitnya. Parameter lain menyangkut responsivitas sistem demokrasi Indonesia

masih mengundang masalah. Sistem politik demokrasi seakan tak berdaya untuk mengatasi melonjaknya kemiskinan. Tak bisa berbuat apa-apa untuk menyediakan lapangan kerja. Pilihan demokrasi disalahkan! Ditawarkanlah sistem politik lain yang sebenarnya juga sama-sama diragukan. Namun, pertanyaan: apakah kelambatan merespons keadaan merupakan kelambatan dari sistem politik demokrasi atau dari aktor-aktor demokrasi itu sendiri?

Dalam kenyataan seperti itulah, pandangan Soekarno menjadi relevan. Demokrasi politik tidaklah cukup. Orang tidak cukup hanya bisa hidup dari politik, melainkan juga demokrasi ekonomi. Bicara soal hak asasi bukan hanya soal hak sipil dan politik, tetapi juga hak ekonomi sosial budaya. Bicara soal hak asasi manusia diawali dengan sarapan pagi.

Mengutip pendapat Jack Snyder (2003), demokrasi Indonesia belum matang. Survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia yang dipresentasikan pada Mei 2006 mengonfirmasi keraguan orang akan demokrasi. Survei itu menunjukkan pandangan: demokrasi sebagai sistem pemerintahan terbaik mencapai 72 persen. Padahal, di negara demokrasi yang sudah mapan dukungan terhadap demokrasi sebagai sistem terbaik rata-rata 84 persen.

Demokrasi Indonesia memang masih dalam proses. Lembaga Survei Indonesia (LSI) sebagaimana dikutip oleh Suara Islam edisi ke-147 menyebutkan bahwa angka golput 10,21 persen pada tahun 1999, selanjutnya meningkat menjadi 23,34 persen pada tahun 2004,

dan pada tahun 2009, angka golput mencapai 39,01 persen.

Demokrasi membutuhkan sosok yang mampu mengarahkan ke manademokrasi akan dibawa. Sosok yang mempunyai visi yang benar mengenai demokrasi, memiliki cara komunikasi politik yang penuh empati, serta mempunyai kecerdasan akademik dan emosional untuk membawa Indonesia ke dalam sistem politik demokratis.

Masalahnya: Indonesia inflasi dengan "demokrasi", (orang bebas bicara apa pun atas nama demokrasi, orang memblokir jalan tol yang merugikan kepentingan publik dengan dalih demokrasi, atas nama demokrasi orang bisa menghakimi kelompok lain yang dicap sesat), tetapi di sisi lain Indonesia mengalami defisit demokrat. Inilah tantangannya!. Indonesia tengah dilanda berbagai masalah yang kompleks. Sistem demokrasi yang seyogyanya menghasilkan masyarakat yang bebas dan sejahtera, tidak terlihat hasilnya, malah kenyataannya bertolak belakang.

Berikut ini adalah beberapa fenomena kegagalan demokrasi di Indonesia.

Pertama, Presiden tidak cukup kuat untuk menjalankan kebijakannya. Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Ini membuat posisi presiden presiden kuat dalam arti sulit untuk digulingkan. Namun, di parlemen tidak terdapat partai yang dominan, termasuk partai yang mengusung pemerintah. Ditambah lagi peran legislatif yang besar pasca reformasi ini dalam menentukan banyak kebijakan presiden. Dalam memberhentikan menteri misalnya, presiden sulit untuk memberhentikan menteri karena partai

yang "mengutus" menteri tersebut akan menarik dukungannya dari pemerintah dan tentunya akan semakin memperlemah pemerintah. Hal ini membuat presiden sulit mengambil langkah kebijakannya dan mudah di-"setir" oleh partai.

Kedua, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat justru di tengah kebebasan demokrasi. Tingkat kesejahteraan menurun setelah reformasi, yang justru saat itulah dimulainya kebebasan berekspresi, berpendapat, dll. Ini aneh mengingat sebenarnya tujuan dari politik adalah kesejahteraan. Demokrasi atau sistem politik lainnya hanyalah sebuah alat. Begitu pula dengan kebebasan dalam alam demokrasi, hanyalah alat untuk mencapai kesejahteraan.

Ketiga, tidak berjalannya fungsi partai politik. Fungsi partai politik paling tidak ada tiga: *penyalur aspirasi rakyat*, *pemusatan kepentingan-kepentingan yang sama*, dan *sarana pendidikan politik masyarakat*. Selama ini dapat dikatakan ketiganya tidak berjalan. Partai politik lebih mementingkan kekuasaan daripada aspirasi rakyat. Fungsi partai politik sebagai pemusatan kepentingan-kepentingan yang sama pun tidak berjalan mengingat tidak adanya partai politik yang konsisten dengan ideologinya. Partai politik sebagai sarana pendidikan politik masyarakat lebih parah. Kecenderungan partai mengambil suara dari masyarakat bukan dengan pencerdasan terhadap visi, program partai, atau kaderisasi. Melainkan dengan uang, artis, kaos, yang sama sekali tidak mencerdaskan malah membodohi masyarakat.

Keempat, ketidakstabilan kepemimpinan nasional. Jika kita cermati, semua pemimpin bangsa ini mulai dari

Soekarno sampai Gus Dur, tidak ada yang kepemimpinannya berakhir dengan bahagia. Semua berakhir tragis alias diturunkan. Ini sebenarnya merupakan dampak dari tidak adanya pendidikan politik bagi masyarakat. Budaya masyarakat Indonesia tentang pemimpinnya adalah mengharapkan hadirnya “Ratu Adil” yang akan menyelesaikan semua masalah mereka. Ini bodoh. Masyarakat tidak diajari bagaimana merasionalisasikan harapan-harapan mereka. Mereka tidak diajarkan tentang proses dalam merealisasikan harapan dan tujuan nasional.

Hal ini diperburuk dengan sistem pemilihan pemimpin yang ada sekarang (setelah otonomi), termasuk pemilihan kepala daerah yang menghabiskan biaya yang mahal. Calon pemimpin yang berkualitas namun tidak berduit akan kalah populer dengan calon yang tidak berkualitas namun memiliki uang yang cukup untuk kampanye besar-besaran, memasang foto wajah mereka besar-besaran di setiap perempatan, masyarakat yang tidak terdidik tidak dapat memilih pemimpin berdasarkan *value*.

Kelima, birokrasi yang politis, KKN, dan berbelit-belit. Banyak sekali kasus KKN dalam birokrasi. Contoh kecil adalah pungli, suap, dll. Ini menjadi bahaya laten karena menimbulkan ketidakpercayaan yang akut dari masyarakat kepada pemerintah. Selain itu berdampak pula pada iklim investasi. Investor tidak berminat untuk berinvestasi karena adanya kapitalisasi birokrasi. Hal di atas mendorong pada birokrasi yang tidak rasional. Kinerja menjadi tidak profesional, urusan dipersulit, dsb.

Prinsip yang digunakan adalah “jika bisa dipersulit, buat apa dipermudah”.

Keenam, banyaknya ancaman separatisme. Misalnya Aceh, Papua, RMS, dll. Ini merupakan dampak dari dianaktirikannya daerah-daerah tersebut semasa orde baru, yang tentunya adalah kesalahan pemerintah dalam “mengurus anak”. Tentunya ini membuat ketahanan nasional Indonesia menjadi lemah, mudah diadu domba, terkurasnya energi bangsa ini, dan mudah dipengaruhi kepentingan asing.

### III. Sosiologi Islam Tentang Demokrasi

Ali Shari’ati adalah seorang doctor sosiologi dan filsafat, alumni Perancis, aktif dalam pergerakan revolusi Iran tahun 70an khususnya melalui tulisannya. Shari’ati mengklaim bahwa uraiannya merupakan tinjauan sosiologi Islam, yaitu uraian sosiologis yang bersumber dari fenomena, pesan-pesan, konsep-konsep di dalam Islam, ia tidak setuju dengan pendekatan sebaliknya yakni pendekatan yang mendeduksi begitu saja konsep-konsep atau teori sosiologi ke dalam ajaran Islam. Ali Shariati mencoba menguraikan fakta dan logika di dalam sejarah dan konsep-konsep di dalam agama Islam dengan menggunakan model analisis sosiologi

Dalam buku *the Asian Drama*, Gunnar Myrdall, pernah mengkategorisasikan dua jenis budaya, *hard state* dan *soft state*. Budaya *hard state*, kata Myrdall adalah jenis budaya yang tegas, konsisten, taat pada *rule of*

*law*, disiplin tinggi, produktif, dan berpandangan jauh ke depan. Sementara *soft state*, adalah jenis budaya yang lemah, inkonsisten, kurang disiplin, kurang memanfaatkan waktu, malas, dan kurang taat pada rule of law.

Menurut Myrdall dalam studinya tahun 1960-an, banyak negara di Asia, termasuk Indonesia, mengalami kebangkrutan ekonomi, miskin dan disertai praktik korupsi yang merajalela sebagai akibat dari ketidakmampuan negara-negara tersebut menciptakan dan menerapkan hukum serta aturan-aturan yang jelas dan tegas. Negara-negara semacam inilah yang dikategorikan sebagai `negara lunak` (*soft state*).

Perilaku keagamaan merupakan variabel dependen yang dipengaruhi oleh pemahaman, penafsiran, dan tradisi keagamaan yang merupakan variabel independen. Ekspresi perilaku keagamaan di masyarakat secara korelatif dipengaruhi tiga variabel itu. Sehingga, tatkala Islam sebagai agama yang dianut puluhan juta penduduknya di Indonesia memberikan nilai-nilai kontributif dalam konstruksi budaya *soft state*, maka sesungguhnya ia terkait dengan perilaku keagamaan yang dianut umatnya.

Perilaku keagamaan di mana pun di dunia ini akan memberikan citra ke publik. Jika perilaku keagamaan didominasi pemahaman, penafsiran dan tradisi keagamaan yang radikal, maka yang muncul adalah *stereotyping* citra perilaku keagamaan yang *fundamentalis*. Begitu juga sebaliknya, jika pemahaman, penafsiran dan tradisi keagamaan yang ramah dan sejuk, maka akan mengekspresikan perilaku keagamaan yang moderat

Dengan perilaku keagamaan yang dianut umat Islam di tanah air telah turut serta dalam konstruksi budaya *soft state*. Tidak heran jika maraknya fenomena aktivitas keislaman, yang diindikasikan semakin membengkaknya angka jamaah haji, semaraknya aktivitas pengajian di kalangan elite, artis, dan di masyarakat, serta munculnya lembaga-lembaga keislaman seperti lembaga keuangan syariah, lembaga pendidikan Islam, dan lain-lainnya, sesungguhnya masih terkait dengan perilaku keagamaan. Ini artinya, kesemarakan itu masih pada dataran fenomena, belum masuk dalam tataran pemahaman dan tradisi yang substantif. Coba ditelaah bahwa fenomena itu belum otomatis membawa agama Islam memberikan kontribusi dalam konstruksi *hard state*. Buktinya, kesemarakan fenomena kurang diiringi meningkatnya produktivitas, kecerdasan, kedisiplinan, ketaatan terhadap hukum yang dilakukan oleh sebagian umat Islam.

Sebaliknya, fenomena semaraknya aktivitas keislaman justru diiringi dengan fenomena semaraknya kriminalitas, korupsi, dan rendahnya *social trust* di kalangan masyarakat. Kesemarakan fenomena aktivitas keislaman belumlah ekuivalen dengan lahirnya masyarakat yang beradab (*civility*), lahirnya masyarakat *hard state*, dan masih terlalu jauh dalam khayalan *baladun thayyibatun wa robbun ghafur*.

Dengan konstataasi seperti itu, perilaku keagamaan di Indonesia sejatinya harus direformulasi. Islam tidak sekadar ditempatkan dalam tenda yang *given*, sulit untuk dijangkau dan repot untuk ditafsir ulang. Islam, kendati *given* harus bergerak dan bekerja. Tentu hal ini sangat

terkait dengan pemahaman, penafsiran dan tradisi keislaman yang dianut umatnya. Tatkala semarak kriminalitas dan korupsi terus bergulir dengan tidak diiringi dengan meningkatnya kualitas insani, daya saing dan produktivitas masyarakat Indonesia, perilaku muslim hendaknya mampu menstimulasi konstruksi budaya *hard state*.

Dalam tradisi Barat, demokrasi didasarkan pada penekanan bahwa rakyat seharusnya menjadi “pemerintah” bagi dirinya sendiri, dan wakil rakyat seharusnya menjadi pengendali yang bertanggung jawab atas tugasnya. Karena alasan inilah maka lembaga legislatif di dunia Barat menganggap sebagai pioner dan garda depan demokrasi. Lembaga legislatif benar-benar menjadi wakil rakyat dan berfungsi sebagai agen rakyat yang aspiratif dan distributif.

Keberadaan wakil rakyat didasarkan atas pertimbangan, bahwa tidak mungkin semua rakyat dalam suatu negara mengambil keputusan karena jumlahnya yang terlalu besar. Oleh sebab itu kemudian dibentuk dewan perwakilan. Di sini lantas prinsip amanah dan tanggung jawab (*credible and accountable*) menjadi keharusan bagi setiap anggota dewan. Sehingga jika ada tindakan pemerintah yang cenderung mengabaikan hak-hak sipil dan hak politik rakyat, maka harus segera ditegur. Itulah perlunya perwakilan rakyat yang kuat untuk menjadi penyeimbang dan kontrol pemerintah.

Secara normatif, Islam menekankan pentingnya ditegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* bagi semua orang, baik sebagai individu, anggota masyarakat maupun sebagai pemimpin negara.

Doktrin tersebut merupakan prinsip Islam yang harus ditegakkan dimana pun dan kapan saja, supaya terwujud masyarakat yang aman dan sejahtera.

Konsep demokrasi memberikan perhatian besar kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kebebasan, dan keadilan sosial. Sebagai ideologi, yang mengatur kemaslahatan bermasyarakat dan bernegara, ajaran demokrasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang sangat menjunjung tinggi nilai keadilan, egalitarianisme dan prinsip-prinsip kebebasan individu maupun kelompok.

Pertama, prinsip keadilan. Menurut Ragib al-Asfahani yang dimaksudkan dengan keadilan adalah keseimbangan yang selaras. Sedangkan dalam hadits kata adil juga sering disebutkan. Untuk itu tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak menjadi umat yang adil. Sebagai komunitas yang beriman harus mampu menegakkan keadilan dalam setiap perkataan dan perbuatan. Jika terjadi perselisihan di tengah masyarakat, seorang mukmin wajib mengedepankan rekonsiliasi antar sesama mukmin untuk menjaga perdamaian. Dalam menetapkan hukum hendaklah berlaku adil dan amanah.

Kedua, prinsip persamaan. Islam hanya mengenal satu umat. Mereka diikat dalam satu ikatan persaudaraan. Islam tidak mengenal perbedaan. Manusia semua sama, dalam hak dan kewajiban. Karena itu, manusia diciptakan untuk bisa menerima perbedaan agama, warna kulit, dan suku bangsa. Dalam Islam ditegaskan bahwa tidak ada perbedaan di mata Sang Maha Pencipta, kecuali dalam hal ketakwaan.

Ketiga, prinsip kebebasan. Prinsip kebebasan berada pada tempat istimewa dalam konsep *syariah*. Prinsip kebebasan adalah tameng untuk terhindar dari segala bentuk kezaliman. Prinsip ini didasari oleh konsep yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Manusia adalah makhluk terhormat yang diberikan kemuliaan oleh Allah untuk mempunyai kebebasan memilih. Kebebasan adalah fitrah. Untuk itu manusia mempunyai kebebasan untuk memilih kebaikan atau keburukan, manusia juga mempunyai kebebasan untuk bertanggung jawab.

Walaupun demikian, manusia tidak dibenarkan untuk menggunakan kebebasannya secara semena-mena. Kebebasan seseorang tidak berakhir pada saat orang lain mulai menghirup kebebasannya. Kebebasan seseorang dibatasi oleh perintah dan larangan *syari'ah* ataupun perintah dan larangan yang disusun dalam kesepakatan bersama. Jadi kebebasan bergerak dalam batasan nilai-nilai agama dan sosial.

Keempat, prinsip hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam hak asasi manusia adalah hak permanen yang dimiliki setiap anak manusia sejak dari lahir hingga akhir hayatnya. Sang Maha Pencipta menganugerahkan akal kepada manusia, agar manusia tidak berperilaku seperti hewan dalam menjalani kehidupannya. Untuk itu, hak dan kewajiban setiap orang harus bisa diterima secara egaliter sebagai pengakuan dari keberadaannya dalam sebuah komunitas

Demokrasi pada substansinya adalah sebuah proses pemilihan yang melibatkan banyak orang untuk mengangkat seseorang yang berhak memimpin dan mengurus tata kehidupan

komunal mereka. Tentu saja yang akan mereka pilih hanyalah orang yang mereka sukai. Mereka tidak boleh dipaksa untuk memilih suatu sistem ekonomi, sosial atau politik yang tidak mereka kenal atau tidak mereka sukai. Mereka berhak mengontrol dan mengevaluasi pemimpin yang melakukan kesalahan, berhak mencopot dan menggantinya dengan orang lain jika menyimpang.

Penerima Hadiah Nobel Perdamaian 2003, Shirin Ebadi pun mengungkapkan hal serupa. Pria kelahiran Iran ini dengan lantang menyatakan, menjadi Muslim bukan berarti tidak bisa menjadi pendukung demokrasi yang baik seperti yang dilakukan orang-orang barat. Bahkan, Ebadi dengan percaya diri mengatakan, Islam sejalan dengan demokrasi. Tidak ada satupun ayat-ayat al-Quran yang kontradiktif dengan hak asasi manusia. Pengalaman pemilu 2004 dan 2009 dan 2014 di Indonesianegara berpenduduk Muslim terbesar di dunia yang demokratis telah menepis rasa skeptisisme yang sudah mengakar. Tidak ada setetes pun darah yang tumpah dalam pesta demokrasi yang diikuti multi partai itu. Semuanya berjalan aman, lancar, dan jujur sesuai dengan standar demokrasi yang berlaku.

Berdasarkan paradigma sosiologi Islam, yang dapat dianalisis oleh pendekatan fungsionalisme yang menekankan sistem, keseimbangan, adaptasi, *maintance*, dan *latency*. Seperti halnya dalam paradigmat yang bersifat seperti Nabi (*prophetic paradigm*) yang melihat bahwa sosiologi sebagai agen perubahan sosial, menekankan keseimbangan dan intergrasi sosial,

Sosiologi profetik melandaskan dirinya pada prinsip untuk melakukan perubahan sosial seperti halnya para Nabi yang masuk secara langsung ke dalam masyarakat untuk melakukan perubahan sosial. Ketika data diperoleh maka analisis yang dilakukan perlu melibatkan pendekatan pemahaman (*intepretatif*) untuk membaca realitas secara obyektif dan kritis.

Umat Islam sejatinya memiliki potensi yang besar untuk mengambil peran lebih besar dalam tata aturan nasional maupun internasional. Tetapi kemampuan komunikasi politik yang terbatas untuk menyampaikan pesan-pesan keagungan Islam seringkali menjadi kendala. Politik Islam adalah suatu keharusan dalam sebuah komunitas Islam yang majemuk. Tetapi, harus pula diterima kenyataan adanya dilema dan problema yang merupakan konsekuensi dalam diri masyarakat Islam itu sendiri. Maka perlu strategi dan taktik perjuangan politik dalam latar kehidupan politik Indonesia yang kompleks dengan kelompok kepentingan politik majemuk dengan komunikasi sebagai salah satu instrumen pentingnya.

#### IV. Kesimpulan

Demokrasi merupakan alat yang sangat tepat untuk mewujudkan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi sebagai wahana kedaulatan rakyat diekspresikan melalui Pemilihan Umum, yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kegagalan demokrasi di Indonesia, dapat direhabilitasi dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik berdasarkan 'Konsep-konsep Islam' seperti keadilan, persamaan, kebebasan, hak asasi manusia, karena konsep tersebut merupakan konsep yang menunjukkan relevansi antara perilaku yang dikehendaki oleh Islam dan prinsip-prinsip demokrasi yang diekspresikan dalam pemilihan umum di Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Dengan demikian Islam sejalan dengan demokrasi dan secara sosiologis dapat dianalisis dengan pendekatan fungsionalisme yang menekankan sistem, keseimbangan, adaptasi, *maintance*, dan *latency*. Seperti halnya dalam paradigma yang bersifat seperti Nabi (*prophetic paradigm*) yang melihat perilaku Nabi Muhammad SAW sebagai agen perubahan sosial, yang menekankan keseimbangan dan intergrasi social.

#### Daftar Pustaka

- Ardi Al-Maqassary. 2014. Islam Dan Demokrasi E-Jurnal jpperadabanislamdd1 40200 s
- Ali Shari`ati. 1979. On the sociology of Islam. translated from the Persian by Hamid Algar. Berkeley: Mizan Press,
- \_\_\_\_\_, 2006. Islam dalam Perspektif Sosiologi Agama IQRA Bandung.
- Doyle Paul Johnson, 2006. Teori Sosiologi, Klasik dan Modern, terjemahan. Robert M. Z.



- Lawang, Jakarta: Gramedia, Jilid 1, hal. 171-2.
- George Ritzer, 2005. Sosiologi, Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, terjemahan. Alimandan, (Jakarta: hal. 15-42
- Hairuman, Badri dkk., 2004. Islam dan Demokrasi, Mengungkap Fenomena Golput Dalam Islam, Jakarta: PT. Nimas Multima, <http://www.transparansi.or.id/artikel/>
- Kiki Muhamad Hakiki, 2016. Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indonesia. Wawasan Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya. Fakultas Ushuludin UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Vol 1, No 1 (2016)
- Mansour Fakhri, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, (Yogyakarta: Insist Press, 2005), Edisi Revisi, hal. 20.
- Rivai, Veithzal, 2013. Islamic Leadership: Membangun Super Leadership, Jakarta: Bumi Aksara.
- Samuddin, Rapung, 2013. Fikih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Berpolitik, Jakarta: Gozian Press,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Undang-Undang (UU) Nomor 08/2012 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislatif)
- Undang-Undang Nomor 2/2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dan dalam hitungan triwulan ke depan,